

MEMBANGUN DESA MANDIRI MELALUI PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

I. LATAR BELAKANG

Rencana pembangunan tahunan dimaksud diwujudkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas dan bawah dan bawah atas serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, memperhatikan pelaksanaan pembangunan kabupaten/kota dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang.

Dari Rencana tersebut di atas dapat dinyatakan permasalahan yang ada adalah Masih Tingginya angka kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja serta kualifikasi tenaga kerja dan masih rendahnya akses kesehatan bagi masyarakat.

Sebagai ilustrasi Penduduk Miskin di Jawa Tengah Bulan Maret 2016 sebanyak 4.507 juta jiwa (13,27%), menurun dibandingkan Maret 2015 sebanyak 4.577 juta jiwa (13,58%).

Teori Perubahan

Selo Soemadjan juga memberikan tanggapan tentang apa pengertian perubahan sosial itu. Dia mengatakan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi pada lembaga lembaga kemasyarakatan di dalam masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai nilai, sikap sikap, dan pola pola perilaku kelakuan di antara kelompok kelompok dalam masyarakat tersebut.

Samel Koenig. Secara ringkas dia memberikan tanggapan tentang pengertian perubahan sosial sebagai modifikasi modifikasi yang terjadi dalam pola pola kehidupan manusia.

Menuru Kingsley Davis, Perubahan Sosial adalah perubahan yang melibatkan struktur dan fungsi masyarakat.

Tujuan Proyek dan Hasil Yang ingin dicapai

Membangun Desa Mandiri Melalui Pemberdayaan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah adalah membantu mewujudkan Sasaran Pokok Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018 yaitu Mengurangi Angka Kemiskinan yang diprediksi menjadi kisaran angka 10,40 – 9,93 % yaitu melalui :

1. Pengurangan beban pengeluaran rakyat miskin;
2. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
3. Pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil;
4. Sinergitas Program Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi dalam mendukung upaya penanganan kemiskinan.

II. DASAR PENYELENGGARAAN KEGIATAN

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 124 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: (10/260/2016), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diselenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan adalah Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berdikari.

IV. SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan adalah :

Bintek Pengelola Perpustakaan Umum, Sekolah, Desa/Kelurahan sebanyak 29 Kabupaten.

V. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Literasi Untuk Kesejahteraan adalah Januari – Desember 2019 bertempat di 29 Kabupaten.

VI. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan Literasi Untuk Kesejahteraan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 melalui Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan sebesar Rp. 1.000.000.000,-

VII. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Literasi Untuk Kesejahteraan Tahun Anggaran 2019.

Semarang,

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

MUHAMAD MASROFI. S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680517 198908 1 02